



Anggaran Segera Disahkan

Kesampingkan Perda, Ahok Gunakan Pergub

PERSETERUAN antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD tidak membuat surut sikap optimis Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pelaksanaan APBD 2015. Diyakini Mendagri akan mengesahkan penggunaan anggaran itu di bulan Maret.

Sehingga bisa direalisasikan pelaksanaan pembangunan pada bulan April. "Bulan Maret ini pasti diputuskan lah. Kalau sampai, berarti disahkan versi kami. Nanti diberikan ke Kemendagri untuk dipertanggungjawabkan sama rakyat," ujar Ahok di Balaikota DKI, kemarin (5/3).

Bahkan Ahok berani menjamin pelaksanaan APBD dengan menggunakan payung hukum berupa peraturan gubernur (pergub). "Kita pakai pergub, bukan perda. Lebih enak kan. Kalau ribut, APBD DKI sampai 2017 kita pakai pergub melulu. Kita bisa belanja lebih benar. Saya bisa bangun rusun lebih banyak sama pak wagub," tandas dia.

Menurut Ahok, Kemendagri lebih memilih mengikuti payung hukum berupa undang-undang (UU). Rancangan APBD DKI 2015 yang lengkap yakni versi Pemprov DKI Jakarta. Karena penyusunannya sudah sesuai prosedur, telah dievaluasi, dan akan dikembalikan pada tanggal 13 Maret kepada Pemprov DKI.

Kemudian Pemprov DKI diberikan waktu selama tujuh hari untuk memperbaikinya sesuai dengan masukan dari Kemendagri. Setelah itu, dikembalikan kepada Kemendagri untuk disahkan, sehingga bisa digunakan untuk pembangunan Kota Jakarta.

"Yang jelas, Jakarta harus punya APBD. Kalau nggak ada APBD, kita nggak boleh terima pemasukan dong, nggak boleh terima pengeluaran. Dirjen mengatakan bahwa mereka yang berhak menentukan APBD itu mana yang dicoret atau nggak. Itu lah fungsi Mendagri. Tujuh hari nggak ke-



DOK/INDOPOS

Basuki Tjahaja Purnama

temu, Mendagri yang mutusin," beber Ahok.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengakui bahwa selama 10 tahun terakhir tidak pernah ada persoalan terkait APBD. Setiap anggaran yang diajukan DPRD DKI langsung diakomodir oleh Pemprov DKI dan tidak pernah melalui pembahasan.

"Kenapa tahun ini bisa ketangkap, karena dulu nggak ada e-budgeting. Nggak pernah tahu ada masalah ini. Dengan e-budgeting, sekarang ketahuan tiba-tiba punya DPRD nggak bisa masuk. Sekjen Kemendagri bilang, APBD kita lengkap, sedangkan yang diberikan DPRD hanya pembelanjaan program kerja saja," ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Ferrial menambahkan, sejak lama DPRD sekadar memberikan pembelanjaan atau program saja. "Itu namanya pokir (pokok pikiran). Itu yang disebut BPKP sebagai anggaran selundupan atau siluman. Tapi dia nggak mau ngaku. Jadi saya persilakan saja mereka jangan cabut angket, teruskan. Supaya ketahuan saya dimasukkan ke penjara atau nggak. Waktu saya ngomong kayak gitu, saya senyum-senyum saja, nunggu mereka meledak (marah)," tandas dia. (wok)